

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN OLEH DINAS  
PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN SORONG**

BERTHSON WILANDER RUATAKUREY

NPP. 30.1536

*Asdaf Kabupaten sorong, Provinsi Papua Barat Daya*  
*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*  
Email : [30.1536@praja.ipdn.ac.id](mailto:30.1536@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr.ir. Eko Budi Santoso, M.T

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Empowerment is an effort to optimize the power that is owned to be utilized by the community. The Community Empowerment Program carried out by the Fisheries and Maritime Services Office of Sorong Regency, West Papua Province, is in the form of mentoring and outreach as well as providing training and guidance to fishing communities. **The purpose** of this study was to find out and analyze the Department of Fisheries and Maritime Affairs in Empowering Fishermen Communities in Sorong Regency, as well as the constraints faced by the Department of Fisheries and Maritime Affairs in overcoming the problems of the Fishermen's Community in Sorong Regency.

**Methods:** The research method used was descriptive qualitative method, data sources were collected using observation, interviews and documentation and technical data collection was carried out by collecting data, presenting data, reducing data and verifying data. **Result:** The research results show that the empowerment of fishing communities has been going well but not optimally. Based on the dimensions of the ability to make their own choices, namely finance and authority, the community has received financial assistance and the authority of the fishing community so that a proper economy is achieved. Based on the dimension of ability to determine their own needs, the community has been involved, both in planning and in decision making. Based on the dimensions of the ability to express, fishing communities are able to express opinions and are also given freedom of action. **Conclusion:** Even though it has been running well, it is concluded that it is not optimal because of the inhibiting factors, namely the facilities are still lacking and there are still limited funds provided. A related suggestion in this study is that it is hoped that the Fisheries Service will carry out a budget evaluation after carrying out a program so that there is no shortage of funds.

**Keywords:** Empowerment, Fisheries Service, Fishermen's Community

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Pemberdayaan adalah upaya untuk mengoptimalkan daya yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Program Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat yaitu berupa pendampingan dan sosialisasi serta memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat nelayan.

**Tujuan Penelitian :** untuk mengetahui dan menganalisis Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kabupaten Sorong, serta kendala yang dihadapi Dinas Perikanan dan Kelautan dalam mengatasi permasalahan Masyarakat Nelayan Kabupaten Sorong.

**Metode:** Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif deskriptif, pengambilan sumber data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknis pengambilan data dilakukan dengan mengumpulkan data, penyajian data, reduksi data dan verifikasi data.

**Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan telah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Berdasarkan dimensi kemampuan menentukan pilihan sendiri yaitu keuangan dan kewenangan, masyarakat telah menerima bantuan keuangan dan kewenangan masyarakat nelayan sehingga tercapai perekonomian yang layak. Berdasarkan dimensi Kemampuan menentukan kebutuhan sendiri masyarakat telah dilibatkan, baik dalam merencanakan maupun dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan dimensi kemampuan berekspresi masyarakat nelayan sudah bisa menyatakan pendapat dan juga diberikan kebebasan bertindak. Berdasarkan dimensi Kemampuan kelembagaan telah dijalankan oleh Dinas Perikanan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui turun langsung dan melihat prosedur kerja yang dilakukan. Berdasarkan dimensi akses pada sumber ekonomi telah ada aplikasi nelayan pintar yang dibuat oleh Dinas Perikanan yang membantu sumber perekonomian. Berdasarkan Kebebasan pada proses reproduksi, masyarakat telah diberikan kebebasan untuk membuat produk.

**Kesimpulan:** Meski telah berjalan dengan baik, namun disimpulkan belum maksimal karena adanya faktor penghambat yaitu fasilitas masih kurang serta terlihat masih keterbatasan dana yang diberikan. Saran terkait dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada Dinas Perikanan agar melakukan evaluasi anggaran setelah melakukan suatu program agar tidak terjadinya kekurangan dana.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Dinas Perikanan, Masyarakat Nelayan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki letak geografis berada di 95' sampai dengan 141' bujur timur serta 6' lintang utara sampai 11' lintang selatan, sehinggah perpatokan posisi bujur timur Indonesia berada di belahan timur dan posisi lintangnya berada di belahan bumi selatan. Selanjutnya Indonesia juga berada di antaran dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia serta diapit oleh dua samudera yakni samudera hindia dan samudera pasifik. Bangsa Indonesia sendiri memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya laut. Potensi sumberdaya laut di Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di wilayah perairan Indonesia. Berdsarkan komoditas udang unggul dengan nilai ekspor sebesar 2,04 miliar dolar AS sepanjang tahun 2020. Dengan ini Indonesia menyumbang 8,8 persen nilai impor dunia. jumlah yang bisa dikatakan besar dan tentunya memerlukan sumber daya manusia yang terlibat dalam mengelola sumber daya perikanan di Indonesia. Perikanan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya ikan maupun lingkungannya dimulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan hingga dengan pemasaran. Untuk menjamin dari berkelanjutan sumber daya tersebut pengelolaan harus dilakukan secara terencana dan terpadu dan memperhatikan peran aktif sebagai partisipasi serta memberi manfaat bagi masyarakat setempat yang bermata pencaharian sebagai nelayan,oleh sebab itu dalam rangka pembangunan nasional pemerintah harus memberikan perhatian pada pembangunan perairan dan kelautan. Sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia memiliki lembaga kementerian yang bertugas menyusun perencanaan dalam mengelola sumber daya tersebut yang telah diatur dalam undang-undang No 22 Tahun 2021. Di Indonesia sendiri memiliki banyak kawasan perairan yang sangat luas di berbagai daerah provinsi. Oleh karena itu untuk membantu melaksanakan tugas lembaga kementerian maka dibentuk suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana tugas dalam mengelolah

sumber daya perikanan dan kelautan di daerah masing-masing. Salah satu OPD yang membantu mengelola tugas tersebut yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Sumber daya perikanan laut di wilayah kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat pada umumnya berada pada Samudera Pasifik (WPP 717) dan Laut Seram (WPP 716); Laut Banda (WPP 715) dan Laut Arafuru (WPP 714). Potensi ikan masih sangat besar yang terdiri dari jenis ikan pelagis besar yaitu tuna, cakalang, marlin, tongkol, tenggiri dan cucut. Jenis ikan pelagis kecil yaitu layang, selar, sunglir, teri, japu, tembang, kembung, lemuru, sedangkan jenis ikan demersal dan ikan karang konsumsi baik besar maupun kecil seperti kakap, kerapu, manyung, bawal. Selain itu juga memiliki potensi udang penaeid, lobster serta cumi-cumi. Potensi sumberdaya perikanan di 4 WPP di atas menurut komisi stock assesment terdiri dari pelagis besar 436.75 ( $10^3$  ton/ tahun); pelagis kecil memiliki potensi 1.364,85 ( $10^3$  ton/ tahun); potensi ikan demersal 350.36 ( $10^3$  ton/ tahun); potensi ikan karang konsumsi sekitar 62.20 ( $10^3$  ton/ tahun); potensi udang penaeid dan lobster sekitar 47,7 ( $10^3$  ton/ tahun); potensi cumi-cumi sekitar 11.02 ( $10^3$  ton/ tahun). (sumber daya yang diambil dari Renstra kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong) Penyebaran jenis-jenis ikan pelagis besar adalah di perairan Distrik Makbon, Distrik Seget dan Distrik Salawati Selatan, sedangkan ikan pelagis kecil berada di perairan Mayamuk, Salawati, Seget dan Salawati Selatan. Sumberdaya ikan demersal berada di perairan Mayamuk, Salawati, Seget dan Salawati Selatan. Sedangkan penyebaran udang penaeid berada di sepanjang pantai perairan sebelah selatan yaitu Distrik Segun, Beraur sampai dengan Bintuni. Potensi jenis kepiting dan rajungan terdapat di sepanjang pantai antara wilayah Distrik Seget. Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Sorong dalam hal ini telah memberikan pemberdayaan melalui pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan tentang alat tangkap dan juga mesin kapal,serta memberikan pelatihan dan bimbingan Teknologi Tepat Guna (TTG) penangkapan ikan,mengeluarkan program kartu pelaku usaha perikanan dan kelautan (KUSUKA). Namum masyarakat nelayan masih belum terberdayakan dikarenakan faktor penghambat yakni kondisi geografis Kabupaten Sorong yang terdiri dari beberapa pulau-pulau memberikan peluang untuk terjadinya

pelanggaran penangkapan ikan, kondisi geografis dan jarak antar Distrik serta produksi dari pusat Kota cukup jauh sehingga menyebabkan tingginya biaya transportasi, adapun telah bergulir perdagangan bebas masyarakat, rendahnya produktivitas dan daya saing usaha perikanan disebabkan armada yang digunakan didominasi kapal ukuran kecil. Penyebab lain terjadinya kemiskinan dalam masyarakat nelayan merupakan tekanan kehidupan yang harus dihadapi, keterlibatan kemampuan teknologi penangkapan, jaringan pemasaran yang dipercaya merugikan nelayan dan sistem bagi output yang tidak seimbang sebagai akibatnya. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian dari pemerintah setempat secara khusus Dinas Perikanan dan Kelautan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Peran dan keterlibatan langsung dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Sorong mempunyai kontribusi dalam peningkatan produktivitas masyarakat nelayan, selain itu akan mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya alam terencana dan terstruktur akan meningkatkan taraf hidup nelayan secara tidak langsung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN OLEH DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN SORONG”

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sorong yakni keterbatasan dana yang dihadapi oleh dinas perikanan dan juga ada beberapa fasilitas yang masih kurang sehingga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh dinas perikanan sekarang ini.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama yang bertujuan Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kelompok bersama. Penelitian terdahulu lainnya yakni penelitian dan skripsi yang dilakukan oleh, Maygsi Aldian Suwandi, Silverius Djuni Prihatin, Matheus Nugroho, Windasai, Mohammad Mas’ud Said, Hayat yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat nelayan dengan lokus provinsi dan kabupaten yang berbeda, dan juga kesamaan lainnya yaitu metode penelitian, metode penelitian yang digunakan sama dengan peneliti sebelumnya di mana penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif. Yang menjadi pembeda antara peneliti ini dan peneliti sebelumnya adalah teori yang di pakai yang dimana teori yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan oleh jim ife. Perbedaan lainya yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang bagaimana bentuk/model pemberdayaan masyarakat nelayan oleh dinas perikanan dan kelautan di kabupaten sorong dan apa kendala yang dihadapi oleh dinas perikanan dan kelautan mengatasi permasalahan masyarakat nelayan di kabupaten sorong sedangkan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis program pemberdayaan masyarakat nelayan dan perkembangan masyarkat nelayan melalui usaha bersama.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti membahas mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sorong dengan menggunakan teori jim ief. Adapun hasil temuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk/model pemberdayaan masyarakat nelayan oleh dinas perikanan dan kelautan di kabupaten sorong dan apa kendala yang dihadapi oleh dinas perikanan dan kelautan mengatasi permasalahan masyarakat nelayan di kabupaten sorong.

## **II. METODE**

Metode di dalam penelitian penulis menggunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang berada di lingkup kondisi sosial yang kompleks dan dinamis seperti pada fokus penelitian yang mengarah pada teknik dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer mencakup metode observasi dan wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk bukti, catatan atau foto dokumentasi yang didapatkan selama penelitian. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk dapat menganalisis masalah yang didapatkan dalam penelitian Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sorong.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Bentuk/model pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan di kabupaten sorong**

bentuk/model pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu langkah, strategi, atau cara yang digunakan suatu daerah untuk membangun, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan yang rendah. Dinas perikanan merupakan pihak yang berperan terhadap pemberdayaan nelayan. Seperti halnya yang dikatakan oleh para ahli tentang pemberdayaan, analisi penulis pada pemberdayaan masyarakat nelayan ini mengacu kepada komponen dasar pemberdayaan oleh jim ife yaitu , kemampuan menentukan pilihan sendiri, kemampuan menentukan kebutuhan sendiri, kebebasan berekspepsi , kemampuan kelembagaan, akses pada sumber daya, kebebasan pada reproduksi. Hasil pengamatan dan pengumpulan data dilapangan terkait tentang pemberdayaan masyarakat nelayan berdasarkan teori jim ife untuk dibahas lebih lanjut dan di analisis kemudian kesesuaian teori ini dan keadaan pelaksanaan di lapangn. Hasil analisi dan kesimpulan dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.

**Tabel 4.5****Fakta,analisi dan kesimpulan pada setiap dimensi pemberdayaan masyarakat nelayan**

<b>NO</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Fakta dan Analisi</b>	<b>Kesimpulan</b>
1	kemampuan menentukan pilihan sendiri	Adanya pemberian kewenangan kepada masyarakat nelayan dalam membuat jenis bantuan.	Masyarakat nelayan dapat diberikan oleh kewenangan dan juga bantuan oleh dinas perikanan dan dapat melakukan peningkatan perekonomian.
2	kemampuan menentukan kebutuhan sendiri	Di ikut sertakan masyarakat nelayan dalam merencanakan program pemberdayaan dan juga pengambilan keputusan dalam melaksanakan rapat.	Dinas perikanan memberikan kewenangan untuk merencanakan dan juga pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat meakukan program yang telah diberikan atau diprogramkan oleh dinas perikanan.
3	kemampuan berekspersi	Masyarakat nelayan di berikan kesempatan untuk menyatakan pendapat keperluan dalam bentuk proposal bantuan dan kebebasan dalam bertindak	Masyarakat nelayan sudah bisa menyatakan pendapat dan juga di berikan kebebasan dalam bertindak untuk dapat memenuhi keperluan dalam
4	Kemampuan kelembagaan	Di berikann kewenagan dari lembaga dalam bentuk layanan informasi dan perkembangan pasar dan juga prosedur kerja untuk mejalankan pemberdayaan yang dilakukan dinas perikanan agar pemberdayaan dapat berjalan	
5	Akses pada sumber ekonomi	Adanya pembuatan aplikasi nelayan pintar dan juga sumber daya ekonomi yang	

		masih kurang dan belum cukup memadai	melakukan aktivitas sebagai nelayan.
6	Kebebasan pada proses reproduksi	Dinas perikanan memberikan kebebasan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan agar untuk membuat produk dan dapat meningkatkan perekonomian	Dinas perikanan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan turun langsung dan melihat prosedur kerja yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan bertujuan pemberdayaan dapat tercapai dan juga peningkatan perekonomian masyarakat nelayan. Dengan adanya aplikasi nelayan pintar yang dibuat oleh dinas perikanan dapat membantu sumber perekonomian yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan dan juga masyarakat dapat meningkatkan perekonomian. Dengan adanya masyarakat nelayan melakukan produk usaha yang juga didukung oleh dinas

			perikanan dalam menjalankan produk tersebut berupa terasi dan juga sambal yang di buat dari udang udang halus.
--	--	--	--

*Sumber: dikelolah oleh penulis 2023*

Tabel 4.7 di atas hanya mebuat ringkasan kecil berupa fakta, analisis serta kesimpulan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Tabel tersebut di buat untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ini kiranya dapat membantu dan sekaligus meringankan sedikit beban dari masyarakat yang memiliki kondisi sosial ekonomi di menengah kebawah, namun masih belum banyak masyarakat yang paham betul akan program pemberdayaan ini sehingga menjadi salah satu faktor penghambat yang membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat.

### **3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan bahwa Keterbatasan dana menjadi hambatan paling berat bagi dinas perikanan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan karena segala sesuatu yang dilakukan membutuhkan anggaran dan dinas perikanan memiliki dana yang terbatas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan.

#### IV. KESIMPULAN

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sorong belum terlaksana dengan baik atau maksimal, hal ini ditunjukkan dengan dari dimensi Akses pada sumber ekonomi yaitu belum lancarnya bantuan yang di berikan kepada masyarakat karena terkendala oleh kendaraan dan sarana prasarana yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat nelayan belum maksimal terlaksana dan juga keterbatasan dana sehingga pemerintah dan dinas perikanan mengalami kesulitan yang sangat berat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan.

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini mempunyai keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian belum sepenuhnya sempurna dan baik, oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan dana otonomi khusus dalam bidang pendidikan di kabupaten manokwari lebih mendalam lagi.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong beserta staf jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung suksesnya pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Hendrawati. 2018. *Maanajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Alfabeta.
- Imron, M.2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Media Presindo., Yogyakarta.
- Ife, Jim. 1997. *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis And Practice*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2010. *Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS( UNS Press)
- Mardikanto, T, and Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Cetakan keempat. Bandung.: Penerbit Afabeta.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- J. Moleong, Lexy. 2013. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2012. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta:Bandung.
- maygsi aldian suwandi. (2021). *membangun masyarakat nelayan melalui kelompok usaha bersama. ilmu sosial dan ilmu politik*, 25.
- RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2022. (2022). 49.

said, M. m. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, 12.

Suwandi, m. a. (2021). membangun keberdayaan nelayan. *pemberdayaan masyarakat nelayan melalui "kelompok usaha bersama berkah samudra*, 25.

[bing.com/search?q=pengertian+pemberdayaan+menurut+eddy+papilaya&q&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=pengertian+pemberdayaan+menurut+eddy+papilaya&sc=0-45&sk=&cvid=C](https://www.bing.com/search?q=pengertian+pemberdayaan+menurut+eddy+papilaya&q&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=pengertian+pemberdayaan+menurut+eddy+papilaya&sc=0-45&sk=&cvid=C)

